MetaCommunication; Journal Of Communication Studies
Vol 4 No 1 Maret 2019
P-ISSN : 2356-4490
E-ISSN : 2549-693X

KOMUNIKASI POLITIK KIAI DALAM PENCALONAN GUS IPUL PUTI PADA PILKADA JAWA TIMUR TAHUN 2018

Bayu Priambodo[1)]

[1)]Magister Ilmu Politik, Fisip, Universitas Airlangga
Alamat Email : bayu.priambodo93@gmail.com

ABSTRACT

This research seeks to see the kiai political communication in the nomination of Gus Ipul Puti in the East Java regional election in 2018. East Java Province is the basis of the Nahdlatul Ulama which is the largest religious organization in Indonesia. But in the 2018 elections the two best keders from the Nahdlatul Ulama organization fought in the elections to fight for the number one seat in East Java. The existence of this phenomenon resulted in segregation within the body of the Nahdlatul ulama organization so as to form two major shafts in East Java's political content. The Lirboyo axis is the axis that supports Gus Ipul and Puti while the Tebuireng axis is the axis that supports Khofifaf and Emil. The method in this study uses descriptive qualitative where data is obtained from interviews with several scholars who support the nomination of Gus Ipul and Puti. The results of this study indicate that the kiai political communication in nominating Gus Ipul as governor had occurred 10 years ago precisely in the East Java regional election in 2008 but because at that time Gus Ipul did not yet have a political party, he was paired with Soekarwo to become deputy governor. The political communication produced a document called the Lirboyo agreement which contained Gus Ipul who would accompany Seokarwo for two periods as deputy governor. The results of political communication were not violated for 10 years because at the time of the 2013 East Java regional election Gus Ipul was still accompanying Seokarwo as deputy governor..
Keywords: *Political communication, kiai, nahdlatul ulama, local election.*

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk melihat komunikasi politik kiai dalam pencalonan Gus Ipul Puti pada pilkada Jawa Timur di tahun 2018. Provinsi Jawa Timur merupakan basis dari Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Namun dalam pemilu tahun 2018 dua keder terbaik dari organisasi Nahdlatul Ulama bertarung dalam pilkada untuk memperebutkan kursi no satu yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya fenomena tersebut mengakibatkan terjadinya segregasi di dalam tubuh organisasi Nahdlatul ulama sehingga membentuk dua poros besar dalam kontentasi politik Jawa Timur. Poros Lirboyo adalah poros yang mendukung Gus Ipul dan Puti sedangkan poros Tebuireng adalah poros yang mendukung Khifififaf dan Emil. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskritif dimana data diperoleh dari wawancara dengan beberapa kiai yang mendukung pencalonan Gus Ipul dan puti. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa komunikasi politik kiai dalam mencalonkan Gus Ipul sebagai gubernur sudah terjadi sejak 10 tahun lalu tepatnya pada pilkada Jawa Timur tahun 2008 namun karena saat itu Gus Ipul belum memiliki partai politik akhirnya dipasangkan dengan Soekarwo untuk menjadi wakil gubernur. Komunikasi politik tersebut menghasilkan dokumen yang dinamakan perjanjian Lirboyo yang isinya Gus Ipul akan mendampingi Seokarwo selama dua periode menjadi wakil gubernur. Hasil komunikasi politik tersebut tidak dilanggar selama 10 tahun karena pada waktu pilkada Jawa Timur tahun 2013 Gus Ipul masih mendampingi Seokarwo sebagai wakil gubernur.

Kata Kunci: Komunikasi politik, kiai, nahdlatul ulama, pilkada.

PENDAHULUAN

Studi ini membahas tentang komunikasi politik para kiai yang ada di Jawa Timur dalam mencalonkan Gus Ipul Puti sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada Jawa Timur di tahun 2018. Dimana pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada Jawa Timur berasal

dari satu organisasi keagamaan yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dimana kader terbaiknya bertarung untuk memperebutkan kursi no 1 di Jawa Timur tentu saja hal ini tidak mudah bagi sebuah organisasi keagamaan. Diperlukan komunikasi yang baik supaya dalam kontestasi politik tidak membuat organisasi menjadi pecah. Mengingat tensi politik dalam sebuah pilkada terutama di Jawa Timur cukup tinggi dan Jawa Timur merupakan basis dari kaum *Nahdiyin*. Fenomena ini sangat menarik karena dalam pilkada sebelumnya organiasai Nahdlatul Ulama selalu bersatu untuk memenangkan pilkada Jawa Timur namun dalam pilkada tahun 2018, Nahdlatul Ulama mencalonkan dua kader terbaiknya untuk bertarung dalam pilkada. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah sehingga menarik untuk diteliti bagaiaman komunikasi politik yang dilakukan oleh para kiai dalam mencalonkan Gus Ipul Puti sebagai calon gubernur dan wakil gubenrnur.

Jumlah daftar pemilih dalam pilkada Jawa Timur merupakan yang terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Di jawa timur daftar pemilih berjumlah 30.155.719 yang tersebar dalam 38 kabupaten/kota yang terbagi dalam 666 kecamatan dan 8.497 kelurahan/desa. Dengan adanya jumlah pemilih yang cukup besar tersebut menjadikan pilkada Jawa Timur sebagai barometer pemilu nasional dimana perhelatan pilkada Jawa Timur cukup berdekatan dengan pemilu nasional. Selain itu juga bukan hanya Jawa Timur yang yang menghelat pilkada serentak di tahun 2018. Sebagian besar tanah jawa mengehelat pemilu di tahun yang sama yaitu pilkada Tengah dan pilkada Jawa Barat. Sehingga hal ini dapat dijadikan indicator dalam pemilu nasional mengingat jumlah pemilih di tiga provinsi hampir mencapai 50% dari pemilu nasional. Tidak mengherankan banyak politisi nasional yang turun dalam kampanye di tiga provinsi tersebut.

Jawa Timur merupakan tempat lahirnya organisasi keagamaan terbesar di Indoensia dan juga Jawa Timur merupakan basis dari Nahdlatul Ulama yang menjadikan ciri tersendiri dalam setiap kontetasi dalam pilkada langsung. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar telah banyak melahirkan tokoh-tokoh penting dalam kancah perpolitikan nasional seperti K.H. Hasyim Asyari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional, K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah presiden ke 4 Indonesia, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum PKB adalah sedikit dari tokoh-tokoh nasional yang lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga Nahdlatul ulama menjadi komponen sosial penting untuk system perpolitik di Jawa Timur. Nahdlatul Ulama sebenarnya merupakan wadah perjuangan politis para ulama tradisional untuk tetap meneguhkan eksistensi sikap politik mereka dalam di tengah maraknya gerakan pembaharuan keagamaan (Anam, 1999:46). Nahdlatul Ulama dapat dikatakan sebagai praktik berjejaring para ulama dan pesantren dalam praktik keagamaan yang

mengedepankan tradisi kebebasan dan berfikir keagamaan yang tidak sepenuhnya berfokus pada konservatisme. Nahdlatul ulama menggunakan praktik komunalisme yang dilakukan oleh para santri maupun kalangan *Nahdiyin* lainnya dimana sikap rasionalisme tidak terlalu dikedepankan. Adanya kausalitik itulah yang menjadikan Nahdlatul Ulama secara fleksibel bisa hadir dalam masyarakat maupun dalam system politik di Indonesia. Islam tradisional berbasis kultur telah menjadi ciri khas dan identitas politik dan loyalitas terpenting bagi warga Nahdlatul Ulama yang merupakan anggota politis organisasi keamaan tertentu.

Dengan adanya dua kader terbaik Nahdlatul Ulama yang bertarung dalam pilkada jatim terjadi yang namanya pembelahan politik di kalangan kiai NU pada pilgub tahun 2018. Hal ini mengakibatkan munculnya dua poros besar dalam pilakda jawa timur. *Pertama,* adalah poros Tebuireng, dimana poros ini mendukung pasangan Khififah dan Emil E dardak. Poros Tubeireng mengacu pada pondok Tebuireng yang dipimpin oleh Gus Solah. *Kedua,* poros Liyboyo, dimana poros ini mendungkung Gus Ipul Puti namun poros sebelumnya juga mendukung Gus Ipul dalam pilkada tahun 2008 dan 2013 namun ketika itu Gus Ipul masih maju menjadi wagub. Poros ini mengacu pada Pondok Lirboyo yang ada di Kota Kediri. Tokoh-tokoh sentral dalam poros ini antara lain KH Anwar Manshur dari pondok Lirboyo dan KH Anwar Iskandar dari pondok AL Amin Kota Kediri (Ainur Rohin : 2018). Sehingga jika dilihat pertarungan politik dalam pilkada Jawa Timur ini bukan beda organisasi namun pertarungan politiknya adalah dalam satu organisasi yaitu Organisasi Nahdlatul Ulama.

Dengan adanya kontentasi dalam tubuh organisasi keagamaan maka hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran seorang kiai dimana masyarakat Jawa Timur menganggap bahwa kiai adalah tokoh yang sangat penting. Keterlibatan kiai dalam dunia politik sebenarnya sudah lama terjadi. Seorang kiai sendiri bukanlah dimaknai sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah saja, namun kiai juga dimaknai sebagai pembentuk relasi kuasa sosial politik dalam masyarakat. Dengan adanya pemikiran seperti ini kemudian membedakan kiai dengan sebutan ulama dimana ulama hanya berfokus pada pengembangan dakwah keagamaan. Dalam system sosial masyarakat Indonesia, seorang kiai memiliki kedudukan dan posisi penting dalam menata kehiduan masyarakat. Kiai di dalam buku (Susan Keller,1984:150) dapat disebut sebagai strategic elite dimana elite informal yang tidak mempunyai kekuasaan informal namun dia mempunyai kewenangan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Kiai sendiri mempunyai tugas antara lain mendidik masyarakat, melakukan control sosial atau memecahkan problem sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai tugas yang secara informal di emban oleh kiai tersebut, kiai kemudian tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hirarkhis atas masyarakat. Kiai dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai actor yang memiliki sumber daya politik yang didasarkan pada

P-ISSN : 2356-4490
E-ISSN : 2549-693X

kharismatik dan tradisional dimana sumber daya tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan sikap atau preferensi politik tertentu dalam struktur sosial masyarakat dan sekitarnya (Mulkhan,2009:55).

Dengan adanya keterlibatan kiai dalam dunia politik menjadikan fenomena ini menarik untuk diteliti. Terdapat beberapa kajian yang menfokuskan penelitianya dalam keterlibatan kiai dalam dunia politik salah satunya kajian dari (Warsito Raharji Jati : 2012) dimana dalam penelitian ini kiai merupakan unsur penting dalam politik dan kultur Nahdlatul ulama. Politisasi ulama dalam pondok pesantren mempunyai implikasi pada semakin terfragmentasinya kalangan *Nahdiyin* di aras local. Kiai harus segera mengurangi pengaruhnya di dunia politik dan kembali ke pesantren untuk medidik santri dan masyarakat. Adanya keinginan untuk berkuasa membuat komitmen dan kesadaran kritis para kiai luntur dan bahkan lalai dalam melihat realitas sosial cultural karena terlalu sibuk untuk praktik berpolitik. Hal ini tentu saja membuat kiai dan pesantren semakin terdelegitimasi dalam dinamika politik local dimana tugas untuk mengayomi masyarakat digunakan untuk mempengaruhi mayarakat dalam maraih suara dalam politik local. Masuknya kiai dalam politik local dengan tujuan membersihkan politik kotor justru dimanupulasi oleh politisi.

Keterlibatan kiai dalam dunia politik tentu saja terdapat beberapa kiai yang menduduki jabatan penting. Hal ini yang merubah status mereka dari strategic elite menjadi rulling elite atau bias disebut dari elite informal menjadi elite formal yang memegang kekuasaan secara sah secara hukum. Kiai yang menjadi pemimpin daerah tentu bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Terdapat beberapa kiai yang memegang kekuasaan penting di Indonesia bahkan ada kiai yang menjadi presiden salah satunya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di daerah terdapat kiai yang menjadi pemimpin daerah karena kultur masyarakat Indonesia yang menganggap kiai adalah sosok penting. Sangat jelas terlihat bagaimana peran kiai dalam memimpin sebuah daerah. Seorang kiai yang menjadi pemimpin berusaha memperjuangkan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan agama dalam sidang DPRD (Ujang Mahadi : 2015). Para kiai mengusung isu yang berbeda saat melakukan komunikasi politik saat kampanye. Isu yang mereka usung antara lain kejujuran, tidak obral janji, mengusung isu perlu adanya keseimbangan pembangunan fisik dan spiritual serta isu dimana masyarakat dapat terlibat dalam pembuatan keputusan.

Dengan banyaknya kiai yang terlibat dalam dunia politik yang semakin hari semakin marak, maka menimbulkan dampak yang cukup significant. Pertama, peran kiai sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan menjadi delegitamasi karena para kiai mengalami penurunan kualitas akibat hanya sibuk untuk berpolitik. Kedua, politik pragmatis telah banyak dikukuhkan oleh para kiai untuk mempertukarkan dukungan politik dan kompensasi yang diterima. Dengan

P-ISSN : 2356-4490
E-ISSN : 2549-693X

adanya pertukaran dukungan tersebut mengakibatkan indepedensi kiai dalam dunia politik menjadi rusak dan akhirnya menjauhkan kiai dari masyarakat. Ketiga, terjadi resistensi dari masyarakat atas sikap politik kiai. Hal tersebut terlihat dari beberapa masyarakat yang tidak mengikuti ajaran dari kiai. Dengan adanya perkebangan demokratisasi dan perkembangan pendidikan yang semakin maju, masyarakat akan semakin pintar untuk membedakan mana seorang kiai yang patut dicontoh,ditaati dan diteladani serta sikap kiai yang hanya mementingkan kekuasaan politik yang lepas dari tugas utama dari seorang kiai (Saidin Ernas & Ferry Muhammadsyah Siregar : 2010)

Dari berbagai penelitian yang menfokuskan kajianya tentang keterlibatan kiai dalam dunia politik ada yang menyebutnya positif ada juga hal negative. Namun berbagai penelitian diatas tidak ada yang menfokuskan bagaimana komunikasi politik kiai dalam pencalonan kepala daerah. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut karena selama ini dalam pencalonan kepala daerah peran seorang kiai sangat kuat apalagi dalam pilkada Jawa Timur yang rata-rata masyarakatnya adalah kaum *Nahdiyin* yang menggap kiai adalah tokoh penting dalam perpolitikan local. Penelitian ini akan menganalisis bagaiama komunikasi kiai dalam pencalonan Gus Ipul Puti dalam pilakada Jawa Timur di tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposive sampling dimana informan dipilih dahulu sebelum melakukan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kemampuan masih-masing informan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan beberapa kiai yang mencalokan Gus Ipul Puti sebagai calon gubernur. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil penelusuran dokumen, buku, maupun berita surat kabar yang dianggap relevan dengan tema penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Politik Kiai Dalam Pencalonan Gus Ipul Puti Pada Pilkada Jawa Timur

Pemilihan Gubernur Jawa Timur merupakan suatu agenda kontestasi politik yang hasilnya tidak hanya berdampak pada provinsi Jawa Timur, namun juga membawa dampak hingga pada level Nasional mengingat Jawa Timur memiliki jumlah pemilih terbesar kedua setelah Jawa Barat yaitu mencapai angka 30.385.986 pemilih yang tersebar di 38 Kota/Kabupaten. Fakta tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu barometer politik Nasional, terlebih periode tahun pemilihan gubernur Jawa Timur yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang waktunya

berdekatan dengan Pemilu Serentak yang akan di selenggarakan tahun 2019.

Tampilnya dua tokoh NU di Pilgub Jatim 2018 yaitu, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa mengakibatkan segregasi politik di kalangan kiai NU. Ada pembelahan politik antara kiai NU pendukung Gus Ipul dan kiai NU pendukung Khofifah. Secara garis besar, para kiai NU yang merapat dan mendukung Gus Ipul tergabung dalam Poros Lirboyo, mengacu pada Pondok Lirboyo Kediri. Para kiai NU lainnya merapat mendukung Khofifah dan mereka berada di Poros Tebuireng, mengacu nama Pondok Pesantren Tebuireng. Para kiai NU yang masuk Poros Lirboyo sebagian besar merupakan kiai yang mendukung pasangan Soekarwo-Gus Ipul di Pilgub Jatim 2008/2009 dan 2013.

Para kiai sepuh NU Jatim yang merapat ke Gus Ipul merupakan kiai-kiai pemangku pondok besar dan berpengaruh di Jatim. Pengaruh kiai dan pondok pesantren yang dipimpinnya tersebar merata di sejumlah kawasan di Jatim. KH Fahrur Rozi mengatakan, sebenarnya tak lebih dari 10 pondok besar di Jatim yang memiliki pengaruh kuat di kalangan pondok lainnya yang skalanya lebih kecil dan warga NU secara keseluruhan. Pondok pesantren dengan pengaruh besar itu antara lain, Pondok Lirboyo Kediri, Pondok Ploso Kediri, Pondok Sidogiri Kabupaten Pasuruan, Pondok Genggong Kabupaten Probolinggo, Pondok Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Kabupaten Situbondo, dan Pondok Langitan di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Kiai Fahrur menjelaskan, pondok pesantren itu memiliki pengaruh dan jaringan almamater di sejumlah wilayah yang saling beririsan dan tak tumpang tindih. Misalnya, kiai-kiai NU yang memimpin pondok pesantren dengan skala lebih kecil di kawasan Mataraman Jatim sebagian besar di bawah pengaruh Pondok Lirboyo dan Pondok Ploso Kediri.

Pengaruh Pondok Salafiyah Syafi'iyah Situbondo tersebar di sejumlah pondok di Kabupaten Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan sebagian Madura. Lalu Pondok Langitan Widang, Tuban pengaruhnya kuat di kalangan pondok pesantren NU di kawasan Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Jaringan alumni dan almamater ini digerakkan kiai-kiai NU yang memimpin pondok pesantren untuk mendukung Gus Ipul-Puti secara informal dan personal. Di mana relasi antara kiai-santri yang bersifat patron-klien masih sangat kuat, sehingga mendukung efektifitas fatwa kiai pondok pesantren dalam konteks dukung-mendukung cagub-cawagub di Pilgub Jatim 2018.

Dalam menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada Jawa Timur di tahun 2018 tidaklah mudah. Diperlukan komunikasi yang baik mengingat Pilkada Jawa Timur merupakan pertarungan dari satu aliran yang sama yaitu dari aliran NU. Kedua kader terbaik NU ini berebut kursi No 1 di Jawa Timur. Pertarungan untuk memperebutkan kursi gubernur ini sebenarnya sudah dimulai ketika pilkada Jawa Timur 2009 namun ketika itu Gus Ipul masih mencalonkan sebagai wakil gubernur. Dalam pilkada tahun 2018 ini Gus Ipul mencalonkan sebagai gubernur Jawa Timur.

Dalam pencalonan Gus Ipul menjadi calon gubernur ini tidak lepas dari dinamika yang terjadi. Proses munculnya nama Gus Ipul menjadi calon gubernur ini tidak lepas dari campur tangan dari kyai yang ada di Jawa Timur.

Para kyai yang ada di Jawa Timur menginginkan seorang gubernur dari kalangan Nahdiyin karena di jawa timur merupakan basis dari Nahdiyin. Gus Ipul yang seorang kader NU oleh para kyai disiapkan untuk menjadi seorang sejak tahun 2008 dimana ketika itu pemilu Jawa Timur digelar pada tahun 2009. Namun karena Gus Ipul tidak mempunyai partai maka para kyai sepakat untuk memasangkan Gus Ipul dengan Pakde Karwo sebagai calon wakil gubernur. Disini terjadi kesepakatan antar kyai supaya Gus Ipul supaya menjadi wakil gubernur agar lebih memahami kondisi yang ada di jawa timur mengingat Pakde Karwo adalah seorang sekda Jawa Timur yang lebih memahami pemerintahan yang ada di Jawa Timur.

Jika dilihat komunikasi politik antar kyai dalam mencalonkan Gus Ipul dalam pilkada Jawa Timur ini sudah dimulai sejak lama. Ketika dalam pilkada Jawa Timur tahun 2009 lalu terjadi kesepakatan bahwa Gus Ipul akan menjadi wakil gubernur selama dua periode supaya ketika Pakde Karwo sudah selesai masa jabatannya Gus Ipul bisa mencalonkan menjadi seorang gubernur. Dengan persetujuan ini menjadikan Gus Ipul menjadi wakil gubernur selama dua periode. Sebenarnya ditahun 2009 terjadi kesepakatan supaya Gus Ipul berpasangan dengan Pakde Karwo dan itu sudah disetujui secara tertulis oleh para kyai di pondok Al-Falah Kota Kediri atau para kyai menyebutnya dengan komitmen ploso. Komitmen ploso merupakan sebuah dokumen yang memuat isi perjanjian antar kyai supaya Gus Ipul menjadi wakil gubernur selama dua periode dan untuk periode yang ketiga mencalonkan Gus Ipul sebagai calon gubenur. Gus Ipul menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama 2 periode merupakan salah satu strategi yang digunakan supaya dapat mencalonkan diri di pada periode yang ketiga. Disini terjadi kesepakatan komunikasi politik dengan adanya dokumen yang dibuat di Ploso bahwa Gus Ipul akan menjadi wakil gubernur selama dua periode.

Hingga akhirnya Pakde Karwo dan Gus Ipul masih setia pada perjanjian tersebut untuk menjadi seorang wakil gubernur untuk periode yang kedua. Dan saat ini menjadi gus ipul di calonkan menjadi seorang gubernur. Dalam proses pencalonan Gus Ipul menjadi calon gubernur ini tidak lepas dari dinamika yang terjadi. Dalam mencalonkan Gus Ipul menjadi calon gubernur yang memulai berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam mencalonkan Gus Ipul menjadi calon gubenur selain dilakukan oleh para kyai juga dilakukan survey internal dari oleh konsultan politik. Selain Gus Ipul terdapat kader dari NU yang disurvey yaitu Gus Halim. Namun karena kedua kader tersebut adalah sepupu maka mereka bersepakat untuk mematuhi apa yang di katakan oleh para kyai. Mereka akan menghormati semua yang telah diputuskan oleh para kyai hingga akhirnya para kyai

menetapkan Gus Ipul menjadi calon gubernur.

Dalam fungsi artikulasi kepentingan proses untuk untuk menetapkan pasangan calon sangat penting untuk dilakukan, karena selain Gus Ipul terdapat juga Gus Halim namun karena semua sepakat untuk mencalonkan Gus Ipul. Hal ini dilakukan karena elektabilitas Gus Ipul lebih tinggi dari pada Gus Halim sehingga para kyai sepakat untuk mecalonkan Gus Ipul. Karena semakin tinggi tingkat elektabilitas pasangan calon maka kemungkinan menang juga akan semakin tinggi. Sehingga ketika survey calon tersebut tinggi maka kemungkinan besar yang akan dicalonkan adalah calon yang memiliki survey paling tinggi tersebut. Sebenarnya penetapan Gus Ipul menjadi calon gubernur ini tidak lepas dari survey yang dilakukan oleh konsultan politik. Jika survey dari Gus Halim lebih tinggi bukan tidak mungkin para kyai akan menetapkan Gus Halim sebagai calon gubernur namun karena survey Gus Ipul lebih tinggi dari pada Gus Halim maka para kyai sepakat untuk mencalonkan Gus Ipul menjadi calon gubernur Jawa Timur.

Hingga pada akhirnya pada pertangahan Oktober 2017 Gus Ipul ditetapkan sebagai calon gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Azwar anas. Dalam menetakan bupati banyuwangi sebagai wakil dari Gus Ipul ini disetujui oleh ketua umum PDIP yaitu Megawati Seokarno Putri yang mana ketika bupati banyuwangi memenagkan pilkada Banyuwangi juga diusung oleh partai PDIP. Namun ditengah jalan Bupati Anas mengundurkan diri sebagai calon wakil gubernur karena ada masalah. Dengan adanya kejadian ini mau tidak mau Gus Ipul harus mencari calon wakil gubernur yang baru yang sesuai dengan dirinya. Hingga akhirnya muncullah nama dari Puti Guntur Soekarno.

Proses pergantian dari Bupati Anas ke Puti Guntur ini sempat ditolak keras oleh beberapa kyai karena hal yang dilakukan oleh Bupati Anas itu merupakan bukan kesalahan kepada rakyatnya namun itu merupakan kesalahan pada dirinya sendiri. Hal yang dilakukan oleh Bupati Anas tersebut nantinya dipertanggungjawabkan bukan kepada rakyatnya namun kepada yang diatas. Beberapa kyai menolak pergantian dari Bupati Anas ke Puti Guntur ini mempunyai alasan yang kuat. Dengan pergantian dari Bupati Anas ke Puti ini maka mereka harus memulai dari awal lagi. mereka harus mengganti APK, foto, brosur, bannner dll untuk diganti dengan gambar Puti Guntur. Sumber daya yang dikeluarkan selama ini untuk pasangan Bupati Anas harus terbuang sia-sia karena diganti. Mereka harus mengelurakan biaya, tenaga, pikiran lebih banyak lagi untuk memasarkan pasangan gubernur dan wakil gubenur yang baru ini. Salah satu kyai yang paling menolak pergantian dari Bupati Anas ke Puti Guntur ini adalah Gus Fahrul dimana beliau adalah teman dekat dari Gus Ipul. Beluai percaya bahwa yang dilakukan oleh Mas Anas situ tidak akan mempengaruhi perolehan suara dalam pilkada nanti karena itu buka kesalahan kepada rakyatnya itu adalah kesalahan dirinya sendiri.

P-ISSN : 2356-4490
E-ISSN : 2549-693X

Hingga akhirnya Puti Guntur dicalonkan sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Gus Ipul dalam pilkada Jawa Timur tahun 2018. Dalam pencalonan Puti Guntur sebagai wakil gubernur untuk mendampingi Gus Ipul juga tidak dilakukan secara asal-asalah. Terdapat risert yang dilakukan oleh lembaga survey hingga akhirnya mecalonkan Puti Guntur sebagai wakil gubernur dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan seperti orang tersebut haruslah seperti Mas Anas yang telah membawa Kabupaten Banyuwangi mendapatkan berbagai pengharggan nasional maupun internasional ketika memimpinnya.

Berbagai Survey menunjukkan bahwa kandidat yang paling kuat untuk menjadi menggatikan Mas Anas adalah Bu Risma Walikota Surabaya. Bu Risma dianggap setingkat dengan Mas Anas karena telah membawa Kota Surabaya mendapat berbagai penghargaan nasional maupun international selain itu juga Bu Risma ketika maju walikota juga dicalonkan oleh PDIP. Bu Risma juga terkenal dengan ketegasannya dalam memimpin Kota Surabaya. Sehingga Bu Risma dianggap sukses dalam memimpin Kota Surabaya. Namun Bu Risma tidak mau dicalonkan karena menggap bawa tugasnya untuk memimpin Kota Surabaya belum selesai hingga akhirnya Puti Guntur dicalonkan sebagai wakil gubernur karena Puti Guntur merupakan calon yang sudah megakar di tubuh PDIP.

Penetapan Puti Guntur sebagai pasangan calon wakil gubernur bukan tanpa alasan. Dalam hal ini partai politik perlu melakukan komuniksi politik yang baik pada kyai dalam menetapkan pasangan calon. Masyarkat Jawa Timur menurut cilfofd Gerz terbagi menjadi 6 segmentasi yaitu arek, pantura, tapal kuda, osing, mataraman dan pendalungan. Menurut pembagian masyarakat Cliford Gerz yang ada di Jawa Timur, Gus Ipul lemah di daerah mataraman dan khofifah sangat kuat di daerah tersebut. Namun di daerah mataraman sangat kuat masyarakat dengan paham nasionalis. Dimana didaerah mataraman adalah pemilih loyal dari PDIP sehingga dengan menarik Puti Guntur menjadi wakil gubernur dapat menarik suara yang ada di daerah tersebut.

Ini juga merupakan salah satu strategi untuk merebut suara yang ada di daerah Mataraman karena selama ini Gus Ipul lemah di daerah mataraman hal ini ditunjukaan oleh beberapa lembaga survey bahwa Gus Ipul lemah di daerah mataraman. Jadi dengan mencalonkkanya Puti Guntur sebagai wakil gubernur merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perolehan suara yang ada di daerah mataramam mengingat di daerah tersebut basis PDIP sangat kuat dan Puti Guntur kader yang memiliki akar sangat kuat di PDIP selain itu juga Puti Guntur adalah cucu dari seokarno yang merupakan orang dari mataraman.

Selama ini dalam melakukan kampanye Gus Ipul dan Puti Guntur sesuai dengan keahlian masing mereka masing-masing. Pembagian tugas keduanya sangat jelas sekali di dalam sebuah kelompok masyarakat. Gus Ipul selama ini berkampanye di daerah-daerah santri atau pondok yang merupakan kaum Nahdiyin. Hal ini dikarena Gus Ipul merupakan lulusan pondok sehingga

P-ISSN : 2356-4490
E-ISSN : 2549-693X

dia lebih menguasai materi yang berhubungan dengan santri. Sedangkan Puti Guntur selama ini lebih berkampanye pada kaum-kaun Nasionalis seperti kelompok-kelompok kesenian, kelompok-kelompok budaya. Karena di Jawa Timur ini sangat kental sekali kelompok budaya dan kesenian. Kelompok tersebut misalnya kelompok tari-tarian, ludruk, wayang dll. Hal ini dilakukan karena keahlian masing mereka masing-masing sesuai dengan hal tersebut sehingga mereka menguasai hal tersebut.

Dinamika pencalonan Gus Ipul Puti sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tidak berjalan secara mulus. Banyak rintangan yang harus dilalui untuk menetapkan pasangan calon tersebut. Penetapan pasangan calon tersebut tidak lepas dari campur tangan para kyai besar yang ada di Jawa Timur yang menginginkan seorang gubenur yang berasal dari kaum NU karena Jawa Timur merupakan basis dari kaum Nahdiyin dan juga banyak dari kaun nasionalis sehingga pasangan calon harus merepresentasikan keduanya. Namun penetapan pasangan calon tersebut juga tidak lepas dari survey yang dilakukan oleh konsultan politik sehingga akhinya survey ini juga mempengaruhi keputusan para kyai untuk mecalonkan Gus Ipul dan Puti sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Dengan jumlah pemilih mencapai 30 juta lebih dan tersebar di wilayah yang begitu luas, maka tak mungkin pragmatisme politik seperti money politics mampu dijalankan tim pemenangan dan cagub-cawagub di Pilgub Jatim 2018. Ada banyak factor penghambat, seperti besarnya biaya politik yang ditanggung, sebaran pemilih di banyak wilayah yang aksesnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga, dan kuatnya control institusi formal dan masyarakat atas proses politik ini, maka keluarga besar santri yang memilih hak pilih dalam Pilgub Jatim 2018 cenderung mengambil keputusan atas pilihan politiknya merujuk pada fatwa politik yang disampaikan kiai panutannya. Ibaratnya, menurut Kiai Fahrur, di Pilgub Jatim 2018 tak mungkin bisa mendapatkan apa-apa. Jika sama-sama demikian faktanya, lebih baik mengikuti garis fatwa dan kebijakan pilihan politik kiai sebagai rujukan pilihan politik massa pemilih santri. “Sama-sama tak dapat apa-apa, lebih banyak ikut apa yang difatwakan kiai. Harapannya dapat barokah dari kiai,” jelas Kiai Fahrur. Dengan gambaran seperti itu , Kiai Fahrur dan Kiai Anwar Iskandar, optimistis dengan pasangan Gus Ipul-Puti di Pilgub Jatim 2018 dari kalangan santri tinggi dan pasangan yang diusung PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan PKS ini.

KESIMPULAN

Dalam mencalonkan Gus Ipul sebagai Gubernur Jawa Timur sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Dalam pilkada tahun 2008 sebenarnya Gus Ipul sudah dicalonkan sebagai calon Gubernur karena para kiai menginginkan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang *Nahdiyin*, namun karena saat itu Gus Ipul belum memilki partai politik maka dibuatlah perjanjian yang dinamakan perjanjian Lirboyo. Dalam perjanjian tersebut Gus Ipul akan mendampingi Soekarwo untuk menjadi wakil gubernur sekaligus belajar untuk memimpin Jawa Timur. Hal ini

P-ISSN : 2356-4490
E-ISSN : 2549-693X

dikarenakan Soekarwo lebih berpengalaman dalam memimpin Jawa Timur dari pada Gus Ipul karena Soekarwo adalah mantan Sekda Jawa Timur. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya para kiai setuju untuk mencalonkan Gus Ipul sebagai wakil gubernur mendampingi Soekarwo. Isi perjanjian tersebut juga berisikan bahwa Gus Ipul akan mendampingi Soekarwo selama dua periode. Setelah masa jabatan Seokarwo habis maka Gus Ipul dicalonkan untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Disini terlihat bahwa terdapat konsistensi untuk menepati perjanjian dari hasil kemunikasi politik tersebut. Dalam hal ini Gus Ipul mendampingi Seokarwo selama dua periode menjadi wakil gubernur Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anam, Choirul. 1999. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama.*Surabaya: Bisma Satu Printing.

Ardial, (2009). Komunikasi Politik. Jakarta. Indeks

Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik: konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers.

Keller, S. I. (1995). *Penguasa dan kelompok elit: peranan elit penentu dalam masyarakat moden*. Rajawali Press.

Mulkhan, Abdul Munir. 2009. *Politik Santri: Cara Merebut Hati Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius.

Nimmo, D. (2005). Komunikasi Politik: Komunikator. *Pesan dan Media, Edisi Keenam, Rosdakarya, Bandung*.

Rauf, M., & Nasrun, M. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Diterbitkan atas kerja sama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Subiakto, H., & Ida, R. (2012). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Kencana.

Sumarno, A. P. (1989). Dimensi-dimensi komunikasi politik. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.

JURNAL

Ernas, S., & Siregar, F. M. (2010). Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *25*(2).

Jati, W. R. (2013). Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *13*(1), 95-111.

Rohim, A., & Mahardika, M. G. (2018). Pembelahan Politik Kiai NU di Pilgub Jatim 2018. *Jurnal Transformative*, *4*(2), 60-7

Susanto, E. H. (2013). Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, *1*(2), 163-172.